BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 9.6 TAHUN 2021

TENTANG
BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
b. bahwa berdasarkan Tarif Retribusi Jasa Usaha yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat perlu ditinjau dan disesuaikan kembali.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tarif Retribusi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Nomor :23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra /tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadiUndang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tahun 2012 Nomor Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tahun 2012 Nomor Seri C);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
13. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak peta (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 26 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmaher Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten halmahera Tahun 2012 Nomor Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 31 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 32 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggran/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
26. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
27. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
29. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
30. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 5.A tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan dan Pendatangganan Dokumen Dibidang Perizinan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Bupatia dalah Bupati Halmahera Barat.
3. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat.
5. Tarif (Biaya yang harus dibayar) adalah Pungutan yang dikenakan terhadap barang dan jasa,
6. Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan Pribadi atau Badan;
7. Pengelolaan usaha dan Perizinan usaha ini dilakukan atau diwajibkan. Perizinan usaha merupakan alat untuk pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan alat pengendalian agar tercapai ketertiban di dalam usaha, kelancaran arus barang, dan kesempatan untuk mengembangkan usaha..
8. Izin usaha adalah sebagai identitas dari usaha sehingga usaha yang Anda jalankan adalah legal atau sah karena mendapatkan lisensi atau izin dari instansi pemerintah yang berwenang.
9. Usaha yang berizin akan dapat menjamin keamanan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 2

(1) Retribusi Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksud untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Sumber Daya Alam, Barang dan Jasa Sarana Prasaran atau Fasilitas Infratruktur dalam berbagai sektor bidang usaha tertentu guna melindungi kepentingan Usaha baik perseorangan maupun Badan Usaha.

(2) Masa Retribusi adalah satu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Retribusi Izin yaitu satu Tahun.

(3) Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang menurut Peraturan Perundang - Undangan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin sesuai klasifikasi dan kualifikasi.

Pasal 3

(1) Retribusi Izin adalah jumlah biaya Retribusi Izin yang harus dibayarkan kepada Pemerintah bagian dari penerimaan daerah dalam obyek Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat (PAD).

(2) Retribusi Izin Usaha dibayarkan dan / atau disetorkan melalui perbankan yang ditunjuk setelah ditetapkan dalam bentuk Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SSRD),

(3) Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SSRD) yang wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang tertuang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan olah Bupati.

BAB III
PENETAPAN TARIF
Pasal 4

(1) Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Perizinan dan Non Perizinan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Pemberian Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian dengan memperhatiakan aspek keadilan dan pemerataan.
(2) Penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada Jenis Izin Usaha.
(3) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati Halmahera Barat ini,

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati tentang penetapan besaran tarif retribusi perizinan dan non perizinan yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan teknis pelaksanaan terhadap Tarif Retribusi atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Halmahera Barat ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 April 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT ,

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & AdmUmum	
Kadis DPMPTSP	
Kabag.Hukum	

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 5 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

M. SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR ..20..

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

JASON K. LALOMO, S.H, LLM
Pembina IV/a
NIP. 19730128 200604 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 9.B TAHUN 2021
TANGGAL : 5 April 2021

TENTANG : BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO	BIDANG USAHA	PERIZINAN PERUSAHA	JENIS IZIN	VOLUME		TARIF/ TAHUN		KET.
I	**SEKTOR IZIN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**							
	A SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP	1 Bidang Pertambangan	Izin Lingungan	m2		Rp	1.000	
		2 Bidan Kawasan Industri	Izin Lingungan	m2		Rp	700	
		3 Bidang Kawasan Perumahan	Izin Lingungan	m2		Rp	500	
		4 Surat Pernyataan Kesanggupan Pengolaan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPP)	Izin Lingungan	m2		Rp	500	
	B SEKTOR IZIN LOKASI	1 Bidang Pertambangan	Izin Lokasi	Hektar		Rp	1.000	
		2 Bidang Kawasan Industri	Izin Lokasi	Hektar		Rp	700	
		3 Bidang Kawasan Perumahan	Izin Lokasi	Hektar		Rp	500	
	C SEKTOR INDUSTRI KEHUTANAN	1 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Atas 6000 M3 atau/Tahun.	Izin Operasional			Rp	1.500.000	
		2 Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu diatas 6000 M3	Izin Operasional			Rp	1.500.000	
	D SEKTOR PERTANIAN	1 Izin Usaha Perkebunan	Izin Operasional			Rp	500.000	
		2 Izin Usaha Hortikultura	Izin Operasional			Rp	500.000	
		3 Izin Usaha Peternakan	Izin Operasional			Rp	500.000	
	E BIDANG PENGOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN [LIMBAH B3] UNTUK USAHA JASA	1 Izin Pengolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3	Izin Operasional			Rp	1.750.000	
		2 Izin Pengolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.	Izin Operasional			Rp	1.750.000	
		3 Izin Pengolaan B3 Untuk Kegiatan Pengolaan Limbah B3	Izin Operasional			Rp	1.750.000	
		4 Izin Pengolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan limbah	Izin Operasional			Rp	1.750.000	
II	**SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN UMUM**	1 Izin Usaha Jasa Konstruksi Konsultan	Izin Operasional	Perusahan Terbatas	PT	Rp	2.500.000	
			Izin Operasional	Perusahaan	CV	Rp	2.000.000	
		2 Izin Usaha Jasa Konstruksi Kontraktor	Izin Operasional	Perusahan Terbatas	PT	Rp	2.000.000	
			Izin Operasional	Perusahaan	CV	Rp	1.500.000	

		3 Sertifikat layak Fungsi [SLF]				GRATIS		
		4 Izin Mendirikan Bangunan [IMB]						
		- Jenis Hunian	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Luas Bangunan	M^2	Rp	10.000	
		- Jenis Usaha	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Luas Bangunan	M^2	Rp	25.000	
		- Jenis Sosial/ Budaya	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Luas Bangunan	M^2	Rp	15.000	
		- Tempat Ibadah	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Luas Bangunan	M^2		Gratis	
		5 Rencana Pemanfaatan Rusun.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Luas Bangunan	M^2	Rp	25.000	
		6 Pembangunan Tower,Menara dan Sejenisnya	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Luas Bangunan	M^2	Rp	35.000	
III	**SEKTOR KESEHATAN**							
	A **BIDANG FARMASI**	1 Usaha Industri Farmasi	Izin Operasional			Rp	1.500.000	
		2 Usaha Industri Bahan Obat	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
	B **BIDANG RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS**	1 Operasional Rumah Sakit	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
		2 Operasinal Puskesmas	Izin Operasional			Rp	750.000	
	C **BIDANG APOTIK**							
		1 Usaha Opeteker	Izin Apoteker			Rp	750.000	
		2 Pratek Apoteker [SIA]	Izin Praktek Apoteker			Rp	750.000	
		3 Kerja Asisten Apoteker	Izin Asisten Apoteker			Rp	350.000	
	D **BIDANG TENAGA MEDIS**	1 Praktek Dokter Umum	Izin Praktek Dokter Umum			Rp	750.000	
		2 Praktek Dokter Spesialis	Izin Praktek Dokter Spesialis			Rp	750.000	
		3 Praktek Dokter Gigi	Izin Praktek Dokter Gigi			Rp	750.000	
		4 Praktek Perawat	Izin Praktek Perawat			Rp	300.000	
		5 Penata Anestesi	Izin Penata Anestesi			Rp	300.000	
		6 Terapis Gigi dan Mulut [SIPTGM]	Izin Trapi Gigi Dan Mulut (SIPTGM)			Rp	300.000	
		7 Praktek Fisiotrapis [RO]	Izin Praktek Fisiotrapis (RO)			Rp	750.000	
		8 Kerja Tehhnikir Gigi	Izin Kerja Tehnikier Gigi			Rp	300.000	
		9 Tenaga Ahli Laboratorium Klinik	Izin Tenaga Ahli Laboratorium Klinik			Rp	750.000	
		10 Pratek Radiorafer	Izin Praktek Radiorafer			Rp	750.000	
	E **BIDANG LABORATORIMUM**	1 Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	Izin Operasional Laboratorium			Rp	1.000.000	
	F **BIDANG KLINIK**	1 Operasional Klinik	Izin Operasional Klinik			Rp	750.000	
IV	**SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	1 Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal	Izin Operasional			Rp	500.000	
		2 Pengembangan Program Atau Satuan Pendidikan Formal	Izin Operasional			Rp	500.000	
		3 Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal	Izin Operasional			Rp	500.000	
		4 Pendirian Perguruan Tinggi	Izin Operasional			Rp	500.000	
		5 Pembukaan Program Study	Izin Operasional			Rp	500.000	
		6 Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan Semua Jenjang Pendidikan	Izin Operasional			Rp	500.000	

V	**SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT DAN LAUT**							
	A BIDANG DARAT	1 Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek	Izin Operasional Angkutan			Rp	500.000	
		2 Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek	Izin Operasional Angkutan			Rp	500.000	
		3 Usaha angkutan Umum	Izin Operasional Angkutan			Rp	500.000	
		4 Pelabuhan Umum	Izin Operasional Angkutan			Rp	500.000	
		5 Usaha Angkutan Laut Pelayanan Rakyat	Izin Operasional Angkutan			Rp	500.000	
		6 Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di perairan	Izin Operasional Angkutan			Rp	500.000	
		7 Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Atau reklamasi	Izin Operasional Angkutan			Rp	500.000	
VI	**SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**							
	A **BIDANG PERIKANAN**	1 Usaha Perikanan Bidang Penangkapan	Izin Operasional	Dibawah 5-GT		Rp	1.000.000	
		2 Usaha Perikanan Pembudidayaan	Izin Operasional			Rp	500.000	
		3 Usaha Perikanan Pengolahan	Izin Operasional			Rp	500.000	
		4 Usaha Perikanan Pemasaran	Izin Operasional			Rp	500.000	
	B **BIDANG PENANGKAPAN**	1 Penangkapan Ikan Untuk Kapal Penangkapan Ikan	Izin Operasional	Dibawah 5-GT		Rp	1.000.000	
		2 Kapal Pengangkut Ikan Hasil Tangkapan Ikan [SIKPI]	Izin Operasional	Dibawah 5 -GT		Rp	1.000.000	
	C BIDANG PETERNAKAN	1 Usaha Budidaya Peternakan	Izin Operasional			Rp	500.000	
		2 Usaha Produksi Pangan/Bahan Pangan	Izin Operasional			Rp	500.000	
		3 Usaha Mendirikan Rumah Sakit Hewan	Izin Operasional			Rp	500.000	
		4 Usaha Praktek Dokter Hewan	Izin Operasional			Rp	500.000	
		5 Usaha Angkut/Transportasi Produk Peternakan	Izin Operasional			Rp	500.000	
		6 Usaha Pembelian Ternak dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.	Izin Operasional			Rp	500.000	
		7 Usaha Ternak Dari dan Luar Wilayah Halmahera Barat	Izin Operasional			Rp	500.000	
		8 izin usaha rumah potong hewan 1 unggas (RPHIRPU)						
		9 izin usaha depok hewan						
		10 izin usaha pengeluaran hasil-hasil ternak dari dalam wilayah halbar						
		11 izin usaha laboratorium veteriher (kesmavet)						
		12 izin usaha budidaya hewan kesayangan						
		13 izin usaha laboratorium kesehatan hewan (keswan)						
VII	**SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							
	A **BIDANG SPEKTRUM FREKUENSI RADIO**	1 Stasiun Radio Dinas Tetap dan Bergerak Darat	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
		2 Stasiun Radio Penyiaran TV dan Radio	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
		3 Stasiun Radio Dians Penerbangan	Izin Operasional					
		4 Stasiun Dinas Maritim	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
	B **BIDANG PENYELENGGARAN JARINGAN TELEKOMINIKASI**	1 Jaringan Tetap Lokas Berbasis Circuit switched	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
		2 Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
		3 Jaringan tetap SLJJ	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
		4 Jaringan SLI	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
		5 Jaringan Tetap Tertutup	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
		6 Jaringan bergerak Seluler	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
VIII	**SEKTOR PARIWISATA**							
	- **BIDANG PARIWISATA**	1 Tanda Daftar Usaha Pariwisata	TDUP			Rp	500.000	
		2 Sertifikasi Usaha	Izin Operasional			Rp	500.000	
		3 Sektor Pariwisata	Izin Pariwisata			Rp	500.000	

IX	**SEKTOR PERKOPERASIAN**						
	- BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO,KECIL MENENGAH (UMKM)	1 Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSU)	Izin Operasional			Rp 1.000.000	
		2 Usaha Pembukaan Kantor Cabang KSU	Izin Operasional			Rp 500.000	
		3 Usaha Pembukaan Kantor Cabang Pembantu KSU	Izin Operasional			Rp 500.000	
		4 Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Izin Operasional			Rp 500.000	
		5 Usaha Pembukaan Kantor Kas KSU	Izin Operasional			Rp 500.000	
X	**BIDANG PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN PANGAN SIAP SAJI**	1 Sertifikat Industri Pangan Rumah Tangga	Izin Operasional			Rp 500.000	
		2 Penambahan Perjenis Produk Pangan	Izin Operasional			Rp 500.000	
XI	**SEKTOR PERDAGANGAN UMUM (Golongan I)**						
	a **Bidang Sembilan Bahan Pokok (Sembako)**	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan			Rp 1.000.000	
		2 Pengecer Usaha Perdagangan	Izin Operasinal Perdagangan			Rp 500.000	
	b **Bidang Usaha Perabot/Furniture**	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan			Rp 1.000.000	
		2 Pengecer Usaha Perdagangan	Izin Operasinal Perdagangan			Rp 500.000	
	c **Bidang Usaha Elektronik**	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan			Rp 1.000.000	
		2 Pengecer Usaha Perdagangan	Izin Operasinal Perdagangan			Rp 500.000	
	d **Bidang Usaha Bahan Bangunan**	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan			Rp 1.000.000	
		2 Pengecer Usaha Perdagangan	Izin Operasinal Perdagangan			Rp 500.000	
	e **Bidang Usaha Konveksi, Pakaian Jadi dan Alas Kaki**	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan			Rp 1.000.000	
		2 Pengecer Usaha Perdagangan	Izin Operasinal Perdagangan			Rp 500.000	
	f **Bidang Usaha Jual Beli Emas**	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan			Rp 1.000.000	
		2 Pengecer Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan			Rp 500.000	
	g **Bidang Usaha Aksesoris**	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan			Rp 1.000.000	
		2 Pengece Usaha Perdagangan	Izin Operasinal Perdagangan			Rp 500.000	
	h **Bidang Usaha Sepeda**	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan			Rp 1.000.000	
		2 Pengecer Usaha Perdagangan	Izin Operasinal Perdagangan			Rp 500.000	
	i **Bidang Usaha Kosmetik**	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan			Rp 1.000.000	
		2 Pengecer Usaha Perdagangan	Izin Operasinal Perdagangan			Rp 500.000	
	j **Bidang Usaha Bunga**	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan			Rp 750.000	
		2 Pengecer Usaha Perdagangan	Izin Operasinal Perdagangan			Rp 500.000	

	k **Bidang Usaha Obat Obatan**	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasinal Perdagangan			Rp 750.000	
		2 Pengecer Usaha Perdagangan	Izin Operasinal Perdagangan			Rp 500.000	
	l **Bidang Usaha Buku/ATK Fotocopy**	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan			Rp 1.000.000	
		2 Pengecer Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan			Rp 500.000	
	m **Bidang Usaha Show Room**	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan			Rp 1.500.000	
		2 Pengecer Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan			Rp 1.000.000	
	n **bidang usaha percetakan/sablon**		Izin Operasional Perdagangan			Rp 1.000.000	
	o **bidang usaha batu bara/kapur/batu bata**		Izin Operasional Perdagangan			Rp 1.000.000	
	p **bidang usaha tegel/genteng/lisun**		Izin Operasional Perdagangan			Rp 1.000.000	
	q **bidang usaha studio foto**		Izin Operasional Perdagangan			Rp 500.000	
	r **bidang usaha loundry/wasserey**		Izin Operasional Perdagangan			Rp 500.000	
	s **bidang usaha tukang gunting rambut/salon**		Izin Operasional Perdagangan			Rp 500.000	
	t **bidang usaha karoke**		Izin Operasional Perdagangan			Rp 1.500.000	
	u **bidang usaha hasil bumi**		Izin Operasional Perdagangan				
	v **bidang usaha swalayan**		Izin Operasional Perdagangan			Rp 1.500.000	
	w **bidang usaha tanda daftar gudang**		Izin Operasional Perdagangan				
	x **bidang usaha bank**		Izin Operasional Perdagangan			Rp 2.500.000	
	y **bidang usaha pembiayaan finance**		Izin Operasional Perdagangan			Rp 1.500.000	
	z **bidang usaha akuntan, pengacara**		Izin Operasional Perdagangan			Rp 1.500.000	
	bidang usaha cold, storage		Izin Operasional Perdagangan			Rp 2.500.000	
XII	**SEKTOR RESTORAN DAN RUMAH MAKAN**	1 Restoran					
		a.Kecil	Izin Operasional Perdagangan			Rp 750.000	
		b.Sedang	Izin Operasional Perdagangan			Rp 1.000.000	
		c.Besar	Izin Operasional Perdagangan			Rp 1.500.000	
		2 Rumah Makan					
		a.Kecil	Izin Operasional Perdagangan			Rp 500.000	
		b.Sedang	Izin Operasional Perdagangan			Rp 750.000	
		c.Besar	Izin Operasional Perdagangan			Rp 1.000.000	
XIII	**INDUSTRI AIR MINUM DAN MINERAL (ISI ULANG)**						
		Air isi ulang	Izin Operasioanl			Rp 750.000	
	b **Usaha Swalayan**	Usaha Perdagangan	Izin Operasional			Rp 1.500.000	
	c **Tanda Daftar Gudang (TDG)**	Usaha Tempat Penampungan					

XIV	**SEKTOR PERHOTELAN**	1 Hotel.	Izin Operasional	Bintang 1		Rp	1.500.000	
				Bintang 2		Rp	2.000.000	
				Bintang 3		Rp	2.500.000	
		2 Hotel Melati	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
XV	**SEKTOR PENGINAPAN**	1 Homestay	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
		2 Motel	Izin Operasional			Rp	1.500.000	
		3 Losmen	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
		4 Villa	Izin Operasional			Rp	1.500.000	
		5 Cottage	Izin Operasional			Rp	1.500.000	
		6 Resort	Izin Operasional			Rp	1.500.000	
		7 Inn	Izin Operasional			Rp	1.500.000	
		8 Pondok Wisata	Izin Operasional			Rp	1.500.000	
		9 Kos kosan						
		Kategori A	Izin Operasional	1 s/d 10	Kamar	Rp	1.000.000	
		Kategori B	Izin Operasional	Diatas < 10	Kamar	Rp	1.500.000	
XVI	**SEKTOR PERBENGKELAN**	1 Bengkel Mobil	Izin Operasional Perdagangan			Rp	750.000	
		2 Bengkel Sepeda Motor	Izin Operasional Perdagangan			Rp	500.000	
		Usaha Suku Cadang dan Aksesoris Mobil dan 3 Motor	Izin Operasional Perdagangan			Rp	500.000	
		4 Usaha Cuci Mobil dan Motor	Izin Operasional Perdagangan			Rp	750.000	
		5 Reparasi Mobil	Izin Operasional Perdagangan			Rp	750.000	
XVII	**USAHA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)**	KATEGORI SUB PENYALUR	Izin Penimbunan dan Rekomendasi					
	- Bahan Bakar Minyak Perjenis		Bahan Bakar Minyak (BBM)					
				1.000 -5.000	Liter	Rp	500.000	
				1000 - 10.000	Liter	Rp	750.000	
				10.000 - 20.000	Liter	Rp	1.000.000	
				20.000 - 30.000	Liter	Rp	1.250.000	
				30.000 - 40.000	Liter	Rp	1.500.000	
				40.000 - 50.000	Liter	Rp	1.750.000	
				50.000 - 60.000	Liter	Rp	2.000.000	
				60.000 - 70.000	Liter	Rp	2.250.000	
				70.000 - 80.000	Liter	Rp	2.500.000	
				80.000 - 90.000	Liter	Rp	2.750.000	
				90.000 - 100.000	Liter	Rp	3.000.000	
				100.000 - 110.000	Liter	Rp	3.250.000	
				110.000 - 120.000	Liter	Rp	3.500.000	
				120.000 - 130.000	Liter	Rp	3.750.000	
				130.000 - 140.000	Liter	Rp	4.000.000	
				140.000 - 150.000	Liter	Rp	4.250.000	

XVIII	**USAHA MINUMAN KERAS (MIRAS)**							
	KATEGORI PENGECER.HOTEL,RESTORAN/TEMPAT LAINYA KLASIFIKASI	GOLONGAN.A (BIR)	Izin Operasional (MK)	500 - 2.500	Botol	Rp	2.000.000	
			Izin Operasional (MK)	500 - 5.000	Botol	Rp	2.500.000	
		GOLONGAN.B (ANGGUR)	Izin Operasional (MK)	500 - 2.500	Botol	Rp	3.000.000	
			Izin Operasional (MK)	2.500 - 5000	Botol	Rp	3.500.000	
		GOLONGAN.C (WISKY)	Izin Operasional (MK)	500 - 2.500	Botol	Rp	4.000.000	
XIX	**KATEGORI DISTRIBUTOR**							
	KLASIFIKASI	GOLONGAN A. (BIR)	Izin Operasional (MK)	50.000 - 100.000	Botol	Rp	6.000.000	
			Izin Operasional (MK)	100.000 - 250.000	Botol	Rp	6.500.000	
		GOLONGAN B. (ANGGUR)	Izin Operasional (MK)	50.000 - 100.000	Botol	Rp	7.000.000	
			Izin Operasional (MK)	100.000 - 250.000	Botol	Rp	7.500.000	
		GOLONGAN C. (WISKY)	Izin Operasional (MK)	50.000 - 100.000	Botol	Rp	8.500.000	
			Izin Operasional (MK)	100.000 - 250.000	Botol	Rp	10.000.000	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & AdmUmum	
Kadis DPMPTSP	
Kabag.Hukum	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 April 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT ,

JAMES UANG